

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembentukan kota-kota di Indonesia sangat dipengaruhi oleh latar belakang sejarah pemerintahan, khususnya pada masa kolonial. Pada abad ke-19 wilayah yang dianggap kota biasanya dibawah pengaruh langsung kekuasaan administrative kolonial. Dalam kajian mengenai kota, batas administratif ialah yang sering dijadikan dasar penelitian, terutama jika menyangkut masalah kependudukan (Lihat misalnya Pauline Dublin Milone, *Urban Areas in Indonesia: Administrative and Census Concept* (Berkeley Institute of International Studies, University of California, 1996). Kota-kota pasca-kemerdekaan kembali ditata berdasarkan aturan-aturan administratif yang ditentukan oleh rezim yang berkuasa. Bahkan di masa Orde Baru penetapan kota-kota diatur berdasarkan tingkatan posisinya, misalnya kota Dati I di tingkat Propinsi, Kota Dati II di tingkat Kabupaten, atau kota administratif Kotamadya.¹

Setiap daerah di Indonesia memiliki sejarah lokalnya sendiri, seperti halnya dengan Kota Muara Bulian yang memiliki sejarah lokalnya sendiri. Sejarah Kota belum banyak mendapat perhatian kalangan sejarawan akademis.² Dapat dikatakan

¹ Ilham Daeng Makkelo. "Sejarah Perkotaan: Sebuah Tinjauan Historiografis Dan Tematis". *Jurnal Lensa Budaya*, Vol. 12, No. 2, Oktober 2017. Edisi Khusus Persembahan Untuk Edward L Poelinggomang. hlm 89

² Kuntowijoyo. 2003. *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Penerbit PT. Tiara Wacana Yogya.

pada awal abad ke-20 kota muncul sebagai suatu kategori dalam sejarah Indonesia. Kota dapat disebut sebagai sebuah kesatuan yang secara sah berdiri sendiri, dan patut menjadi bidang kajian yang tersendiri pula. Sejarah kota mengacu pada pemahaman rekonstruksi tertulis mengenai masa lalu sebuah kota, dalam hal ini Kota Muara Bulian. Dalam kajian mengenai kota, batas administratif ialah yang sering dijadikan dasar strategi penelitian, terutama jika menyangkut masalah kependudukan.³ Untuk penelitian sejarah, batas wilayah kota tentu saja mengikuti perkembangan kota itu sendiri, tidak terikat oleh ketentuan-ketentuan administratif. Secara substansi, sejarah kota sering disebut sebagai sejarah yang menyeluruh (*total history*). Muara Bulian merupakan sebuah wilayah geografis yang semula berstatus sebagai tempat pemukiman, selanjutnya berkembang menjadi sebuah kota, kemudian berstatus sebagai ibu kota Kabupaten Batanghari (1979).

Kabupaten Batanghari dibentuk pada Tanggal 1 Desember 1948 melalui Peraturan Komisararis Pemerintah RI di Bukit Tinggi No.81/Kom/U tanggal 30 November 1948 dengan Pusat Pemerintahannya di Kota Jambi.⁴

Tahun 1965 Jambi terdiri dari Kabupaten Batanghari, Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci dan Kota Jambi yang yang dikukuhkan dengan Undang-Undang darurat No.19 Tahun 1957 Secara historis, pada masa pemerintahan Nurdin sebagai

³ Pauline Dublin Milone. 1966. *Urban Areas In Indonesia: Administrative And Census Concepts* (Berkeley: Institute of International Studies, University of California).

⁴Pemerintah Kabupaten Batanghari. *Sejarah Singkat Kabupaten Batanghari*. (<http://batangharikab.go.id/bat/statis-7-sejarahberdirinyakabupatenbatanghari.html>). Diakses 22 Desember 2020).

Bupati Pertama 1950 -1952 kawasan Batanghari masih belum memiliki otonomi dan kedudukan pusat pemerintahan sebagai Daerah Tk. II secara pasti, ini berlangsung hingga masa kepemimpinan M. Djamin Datuk Bagindo 1952- 1963, dan Abdul Manaf Bupati ketiga 1953-1954. Namun demikian pembangunan di kawasan Batanghari terus berjalan Sejak tahun 1954 cikal bakal pemimpin-pemimpin wilayah Batanghari, dalam hal ini memperbaiki mekanisme pemerintahan daerah serta mewujudkan berbagai aspek pembangunan mulai dirintis sebagai langkah awal menuju pembangunan berikutnya.

Kabupaten Batanghari sebagai salah satu Kabupaten terdekat dengan Kota Jambi mempunyai peran penting sebagai penyangga perekonomian bagi kota Jambi. Letak strategis inilah yang diharapkan mampu menjadi pendorong perekonomian daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Terlebih lagi dengan luas wilayah yang semakin kecil sejak mekarnya Kabupaten Muaro Jambi. Harapan Pemerintah Daerah Kabupaten Batanghari lebih fokus dalam melakukan perencanaan dan kebijakan pembangunan, baik pembangunan fisik maupun sumber daya manusia.⁵

Pada masa periode pimpinan H. Bakri Sulaiman tahun 1958-1966 terjadi perubahan otoritas pemerintahan, Ibukota Kabupaten Batanghari dipindahkan ke KM.10 Kenali Asam (saat ini masuk wilayah Kota Jambi). Namun pada tahun 1966 wilayah Kabupaten Batanghari dimekarkan menjadi 2 Daerah Tingkat II yakni

⁵ Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, *Indikator Ekonomi Kabupaten Batang Hari Tahun 2011*, Jambi: BPS Provinsi Jambi. 2012

Kabupaten Batanghari dengan Ibukota Kenali Asam dan Kabupaten Tanjung Jabung dengan Ibukota Kuala Tungkal. ⁶Pada Tahun 1966-1968 Kabupaten Batanghari dipimpin oleh Drs. H.Z. Muchtar DM kemudian pada tahun 1968-1979 dilanjutkan oleh Rd. Syuhur. Pada tahun 1979 Pusat Pemerintahan Kabupaten Batanghari dipindahkan dari Km. 10 Kenali Asam ke Muara Bulian berdasarkan UU NO. 12 Tahun 1979 dan diresmikan oleh Mendagri Bapak Amir Machmud tanggal 21 Juli 1979.

Kemudian pada Tahun 1981-1991 Kabupaten Batanghari dipimpin oleh Drs.H. Hasip Kalimuddinsyam. Pada tahun 1991-2001 Batanghari dipimpin oleh Bupati H.M. Saman Chatib, SH. Selanjutnya berdasarkan UU. No. 54 tahun 1999 kabupaten Batanghari dimekarkan kembali menjadi 2 Kabupaten, yakni Kabupaten Batanghari yang beribukota Muara Bulian dan Kabupaten Muaro Jambi yang beribukota Sengeti yang peresmian dilakukan oleh Mendagri di Jakarta pada bulan Oktober 1999. Dengan latar belakang tersebut maka penulis ingin mengangkat tentang sejarah kota Muara Bulian 1979-1999, bagaimana perkembangan sebelum dan sesudah dipindahkan ibu kota Batanghari dari Kenali Asam ke Muara Bulian, dan kemudian dimekarkan lagi menjadi 2 kabupaten yaitu kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi.

Berdasarkan penjelasan diatas melihat bahwa Kabupaten Batanghari merupakan Kabupaten yang tertua bahkan lebih tua dari provinsi Jambi. Kabupaten Batanghari

⁶ Drs. Sudarto. 1993. *Sejarah Lahirnya Kabaupaten Batanghari*. Jambi. Hlm 133.

sendiri merupakan Kabupaten yang ibukotanya berada diwilayah Kota Madya (Kenali Asam). Perpindahan Ibukota Batanghari ke Muara Bulian telah menjadikan Muara Bulian sebagai desentralisasi baru bagi Kabupaten Batanghari dengan demikian penulis bermaksud untuk memperdalaminya. Dengan demikian diberi judul **“Exsistensi Muara Bulian Sebagai Ibukota Kabupaten Batanghari 1965-1999”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka ditariklah rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana latar belakang sejarah terbentuknya Muara Bulian?
- 1.2.2 Bagaimana perkembangan sosial politik ekonomi Muara Bulian tahun 1979-1999?

1.3 Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui latar belakang sejarah terbentuknya Muara Bulian.
2. Untuk mengetahui perkembangan sosial politik ekonomi Muara Bulian tahun 1979-1999.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Secara Akademisi

- a. Bagi ilmu pengetahuan, dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang sejarah, terutama sejarah lokal.
- b. Bagi Peneliti dapat menambah wawasan dengan pengaplikasian ilmu yang telah diperoleh secara teori di lapangan.
- c. Sebagai sumber rujukan bagi pemerintahan Kabupaten Batanghari terhadap sejarah lokal yang ada di Batanghari terkhusus Muara Bulian
- d. Bagi peneliti lain dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian berikutnya.

2. Manfaat Teoritis

- a. Bagi pemerintah, sebagai inventarisasi acuan dalam pengambilan kebijakan terkait daerah setempat dengan mempertimbangkan latar belakang historis daerah tersebut, kebijakan dalam melindungi dan mengembangkan tempat bersejarah untuk meningkatkan perekonomian dan memperbaiki perekonomian masyarakat.
- b. Bagi masyarakat umum, sebagai referensi untuk mengetahui bagaimana kehidupan dan perenoman masyarakat setelah dipindahkannya Ibukota Batanghari dari Kenali Asam ke Muara Bulian, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya sejarah yang juga berpengaruh terhadap peradaban.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian sejarah harus mempunyai ruang lingkup penelitian yang dibatasi

secara spasial (wilayah) dan temporal (waktu). Untuk spasial penelitian ini adalah Muara Bulian Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Untuk temporal tahun 1979 karena pada tahun ini Ibu Kota Batanghari dipindahkan dari Kenali Asam ke Muara Bulian, dan Batas akhir penulisan ini tahun 1999 karena pada tahun ini Batanghari dimekarkan kembali menjadi 2 kabupaten yaitu, Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi. Selanjutnya penulis menekankan kepada perpindahan Ibukota Batanghari yang pada awalnya di Kenali Asam kemudian di pindahkan ke Muara Bulian, dan menyoroti perkembangan Muara Bulian dalam prespektif sejarah kota.

1.4 Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang sejarah Kota sudah ada yang menulis tetapi terdapat di daerah lain, banyak skripsi maupun tesis yang bisa di jadikan sebagai referensi lain sebagai berikut:

Pertama penelitian dari Nandang Rusnandar yang berjudul “sejarah kota Bandung dari *Bergdessa* (desa udik) menjadi Bandung *Heurin Ku Tangtung* (Metropolitan). Penelitian ini membahas tentang sejarah kota Bandung yang pada awalnya Bandung hanya kota yang sangat sepi terdiri dari 25 sampai 30 rumah saja. Diperkirakan dalam satu rumah hanya ada 4 anggota keluarga, maka dari 25 sampai 30 rumah tersebut diperkirakan penduduk di tempat itu berjumlah seratus dua puluh jiwa dan diduga semuanya adalah orang Sunda. Itulah penduduk yang menempati “Dayeuh Bandung” sebagai cikal bakal Kota Bandung. Bandung yang kemudian menjadi sebuah kota metropolitan yang indah

penuh sanjung sampai sekarang ini.

Kedua skripsi dari Wiwik Yulianingsih yang berjudul “Sejarah Kota Mojokerto (1918-1942)”, skripsi ini membahas tentang perkembangan kota Mojokerto Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah sejak dibentuknya *gemeente* sangat tampak pada pembangunan sarana fisik. Meski pembangunan tersebut sebenarnya diperuntukkan bagi warga Eropa, namun masyarakat Indonesia juga ikut merasakan dampak positif dari pembangunan tersebut. Pembangunan yang dilakukan adalah pembangunan pasar, gedung pemerintahan, perbaikan jalan dan kampung, pemandian umum dan pengadaan air bersih. Pendidikan yang dilaksanakan di Mojokerto pun masih belum begitu terencana, sekolah-sekolah resmi baru didirikan pada akhir tahun 1940. Sedangkan untuk hiburan pada waktu itu masih berupa wayang, panggung sandiwara dan bioskop, yang kemudian menimbulkan dampak sosial dari diberlakukannya desentralisasi di Mojokerto menimbulkan berbagai permasalahan yang cukup kompleks. Mulai dari pencurian, pembunuhan, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh *gemeente*.

Ketiga skripsi dari Vera Vidiana Rika yang berjudul “Sejarah Kota Lubuksikaping Masa otonomi Daerah (2000-2015)”, skripsi ini membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan fisik kota pada masa otonomi daerah. Kota Lubuksikaping setelah adanya Undang-undang otonomi daerah lebih menunjukkan eksistensinya sebagai Ibukota Kabupaten, setelah Kabupaten Pasaman terbagi dua pada tahun 2002 menjadi Kabupaten Pasaman dan Pasaman

Barat, Kota Lubuksikaping yang merupakan ibukota Kabupaten Pasaman semakin maju baik itu dalam perubahan fisik kota, adanya sarana-sarana kota. semakin ditambah adanya sarana pendidikan, perkantoran, pasar dan transportasi. Hal ini diiringin dengan perkembangan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Keempat skripsi dari Danu Ari Prasajo yang berjudul “Sejarah Kota Ambarawa 1902- 1940”. Skripsi ini membahas tentang sejarah Kota Ambarawa. Skripsi ini berisi tentang latar belakang Ambarawa menjadi sebuah kota dan seperti apa perkembangan Ambarawa tahun 1902-1940. Melihat keberadaan benteng militer di Ambarawa secara tidak langsung dapat membuka gerbang modernisasi. Dengan ditambahnya perkebunan maka semakin bertambah pula penduduknya walaupun hal ini juga menyebabkan banyak dampak yang terjadi seperti dalam hal nya kesehatan dimana Ambarawa menjadi salah satu wilayah dimana masyarakatnya banyak menderita pes. Dari banyaknya hal yang terjadi, Ambarawa juga menjadi salah satu kota penting dalam hal militer dan ekonomi bagi pemerintah Belanda.

Kelima skripsi dari Muhammad Faisal yang berjudul “Sejarah Pemekaran Kabupaten Batanghari Tahun 1999-2014”. Skripsi ini berisi tentang pemekaran Kabupaten Batanghari yang menjadikan Batanghari menjadi sebuah daerah Otonom, dan adanya perubahan yang signifikan dibandingkan sebelum adanya pemekaran wilayah. Hal tersebut dapat dilihat dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang mengalami perubahan secara positif. Misalnya produktivitas

masyarakat Desa yang mengalami kenaikan dibanding masa sebelum dimekarkannya. Kemiskinan masyarakat merupakan indikator dari adanya perubahan ekonomi di Kabupaten Batanghari tersebut.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini lebih mengarah kepada pemindahan Ibukota Batanghari yang semula di Kenali Asam dan kemudian dipindahkan ke Kota Muara Bulian, selain itu juga terdapat persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang perkembangan daerah dalam perspektif sejarah.

1.6.Kerangka Konseptual

Konsep yang menjadi acuan penelitian adalah konsep tentang kota/daerah/wilayah yang merupakan wadah dari berbagai aspek kehidupan yang sangat kompleks yang ditafsirkan dari berbagai sudut pandang.⁷ Menurut ahli ekologi yang dimaksud dengan kota adalah masalah kependudukan yang terpisah-pisah karena latar belakang kemakmuran dan kebudayaan. Menurut ahli ekonomi, kota merupakan pusat produksi, perdagangan, dan distribusi dengan basis kesatuannya ialah organisasi-organisasi ekonomi.⁸

Langkah yang sangat penting dalam membuat analisis sejarah ialah menyediakan suatu kerangka pemikiran atau kerangka konseptual yang mencakup berbagai konsep dan teori yang akan dipakai dalam membuat analisis itu. Permasalahan yang menjadi bidang kajian sejarah kota sesungguhnya sangat luas

⁷ Basundoro.

⁸ Ibid

sekali, seluas sejarah sosial sendiri, sehingga kadang orang menjadi bingung tentang apa saja yang tidak termasuk kedalam sejarah kota. Keluasan itu sendiri membuat penulisan sejarah kota untuk memikirkan sendiri defenisi bidangnya. Dari satu sisi, sejarah kota dapat dimasukkan kedalam sejarah lokal, dan dari sisi lain sejarah kota juga dapat dimasukkan kedalam sejarah lainnya, seperti sejarah ekonomi, politik, demografi, dan sebagainya. Di semua jenis penulisan itu kota hanyalah merupakan lokasi bagi kajian yang bermacam-macam. Jika semua yang mengenai kota, kejadian di kota, dapat menjadi bidang sejarah kota, kiranya semua hal termasuk di dalamnya. Membuat batasan tentang sejarah kota tentu saja tidak dimaksudkan untuk mempersempit bidang kajian, tetapi sekedar untuk membuatnya jelas dan mengukuhkan keabsahan sejarah kota sebagai suatu jenis penulisan sejarah.

Di dalam penelitian ini penulis membahas tentang pemindahan Ibukota yang dimana didalamnya terdapat perubahan sosial. Di sini penulis menggunakan teori perubahan sosial. Di dalam sistem sosial, masyarakat selalu mengalami perubahan. Tidak ada masyarakat yang tidak mengalami perubahan, baik dalam taraf yang kecil maupun dalam taraf yang besar.⁹ Akan selalu ada perubahan, perubahan dapat mencakup aspek yang sempit maupun yang luas. Aspek yang sempit meliputi perilaku dan pola pikir manusia. Sedangkan aspek yang lebih luas dapat berupa perubahan dalam tingkat struktur masyarakat yang nantinya dapat mempengaruhi perkembangan masyarakat di masa yang akan datang.

⁹ Martono, Nanang. 2011. *Sosisologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Post modern, dan Poskolonial*. Jakarta: Rajawali Pers

Pembahasan mengenai perubahan sosial juga mengemuka dalam penulisan sejarah perkotaan. Bagaimana transformasi sosial berlangsung bisa digali dan diterangkan dengan berbagai analisa. Selain transformasinya, juga perhatian pada sistem sosial di kota. Kota sebagai sebuah sistem sosial menunjukkan kekayaan yang tak pernah habis sebagai bidang kajian. Kegiatan masyarakat kota seperti kegiatan domestik, agama, politis, dan hubungan antar warga secara struktural antara lembaga-lembaga masyarakat, hubungan kategorikal antara kelompok-kelompok etnis, status dan kelas, dan bahkan hubungan personal antara sesama warga kota menjadi bahan kajian tersendiri. Secara metodologis bahan utamanya adalah banyaknya tulisan-tulisan di surat kabar, majalah, dan buku-buku sastra. Juga kemungkinan mengadakan penggalian sumber melalui sejarah lisan menjadi sangat membantu.¹⁰

Menurut Kingsley Davis:

Davis mengartikan bahwa perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam struktur dan fungsi masyarakat. Misalnya, di dalam organisasi-organisasi buruh dalam masyarakat kapitalis modern, yang kemudian menyebabkan perubahan dalam hubungan antara buruh dan majikan. Selanjutnya terjadi perubahan-perubahan dalam organisasi ekonomi dan politik.¹¹

¹⁰ Ilham Daeng Makkelo. SEJARAH PERKOTAAN: SEBUAH TINJAUAN HISTORIOGRAFIS DAN TEMATIS. Jurnal Lensa Budaya, Vol. 12, No. 2, Oktober 2017. Edisi Khusus Persembahan Untuk Edward L Poelinggomang ISSN: 0126 - 351X .

¹¹ Prof. Dr. M. Tahir Kasnawi. 2016. *Konsep dan Pendekatan Perubahan Sosial*. Jurnal Universitas Terbuka Modul 1

Pada lain pihak, sosiolog Indonesia, Selo Soemardjan lebih melihat perubahan sosial itu dari kaca mata perubahan lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat. Perubahan lembaga-lembaga kemasyarakatan itu mempengaruhi sistem sosialnya termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat¹⁰. Pengertian perubahan sosial menurut Soemardjan ini tidak berbeda jauh dengan Kingsley Davis yang mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan- perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat.¹²

Menurut Auguste Comte:

Compte berpendapat dalam kehidupan suatu masyarakat, banyak mengalami perubahan secara evolusi dalam unsur-unsur kehidupan. Namun di dalam unsur-unsur tersebut harus mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap kehidupan masyarakat, sehingga dapat mendorong terjadinya perubahan sosial. Dalam hal ini, pengaruh terbesar adalah dari evolusi intelektual, atau perubahan secara bertahap dalam cara dan kekuatan berpikir manusia.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sejarah kota ada beberapa ahli yang membuat konsep kota seperti.

Max Weber berpendapat bahwa:

Suatu tempat dapat dikatakan sebagai kota apabila penghuni setempatnya dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan ekonominya di pasar lokal. Barang-barang itu harus dihasilkan oleh penduduk dari pedalaman dan diperjual belikan di pasar itu, jadi menurut Weber ciri kota adalah adanya pasar dan benteng serta mempunyai sistem hukum tersendiri dan bersifat kosmopolitan.¹³

¹² Jelamu Ardu Marius. 2006. *Perubahan Sosial*. Jurnal Penyuluhan Institut Pertanian Bogor Vol.2, No.2.

¹³ Sapari Imam Asy'ari, Sosiologi Kota dan Desa, (Surabaya: Usaha Nasional Surabaya, 1993), hlm. 18

Beberapa ahli juga mengemukakan pendapat tentang kota misalnya Louis Wirth berpendapat:

Kota adalah sebuah pemukiman permanen dengan individu-individu penghuninya yang heterogen, jumlahnya relatif luas dan padat serta menempati areal tanah yang terbatas (a relatively large, dense and permanent settlement of socially heterogenous individuals).¹⁴

Sedangkan seorang ahli kota Menurut Mayer beliau berpendapat:

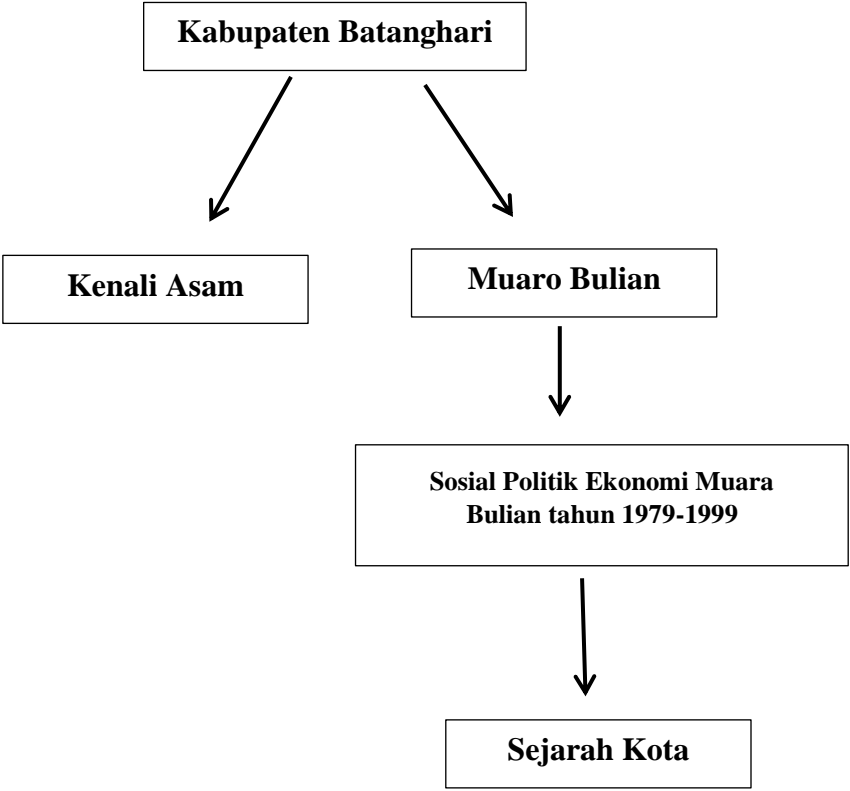
Kota nampak sebagai tempat bermukim dan orang-orang yang mendiami tempat itu, kota bukan terdiri dari rumah-rumah, gedung-gedung seperti masjid-masjid, gereja, biara, kantorkantor, tembok-tembok, kanal-kanal, jalan-jalan dan taman-taman, melainkan orang-orang yang menghuninya dan menciptakan hal-hal baru.¹⁵

Dari penjelasan diatas maka dapat dibuat kerangka yang akan menjelaskan dan mempermudah penulis dalam melakukan penelitian dengan alur sebagai berikut :

¹⁴ Sapari Imam Asy'ari, Sosiologi Kota dan Desa, (Surabaya: Usaha Nasional Surabaya, 1993), hlm. 28

¹⁵ Bosondoro. Sejarah Pemerintah Kota Surabaya, (Yogyakarta: Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga dan Elmatara Publishing, 2012), hlm. 1.

Gambar 1.1 Bagan Kerangka Berfikir “Eksistensi Muara Bulian Sebagai Ibukota Batanghari.



1.7 Metodologi Penelitian

Sebagai ilmu, sejarah memerlukan metode dan metodologi. Metode merupakan suatu cara untuk mencapai ilmu pengetahuan. Apabila sebuah ilmu tidak mempunyai metode, maka tidak layak disebut ilmu. Metode penelitian sejarah dapat diartikan sebagai metode atau cara yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian peristiwa sejarah dan permasalahannya. Adapun empat tahapan metode yang digunakan dalam penelitian sejarah yaitu: Heuristik, Kritik Sumber, Interpretasi, Historiografi.

1. Heuristik(pengumpulan data)

Adapun langkah pertama yang harus dilakukan dalam penelitian ini adalah heuristik. Heuristik adalah kegiatan menghimpun sumber-sumber sejarah dan sebagai tahap awal dalam melakukan penelitian sejarah.¹⁶ Menurut G.J Reiner heuristik merupakan sebuah teknik, suatu seni dan bukan suatu ilmu yang mana tidak mempunyai peraturan-peraturan umum. Heuristik merupakan adanya suatu keterampilan dalam menemukan mengenai dan 5 memperinci bibliografi atau mengklarifikasi dan mencari catatan-catatan dan data dari kepustakaan. Maka dari uraian diatas penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan, dengan mengumpulkan sumber-sumber, literatur-literatur, buku-buku, adapun dalam bentuk jurnal dan skripsi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Penulis juga akan mengumpulkan sumber melalui wawancara dengan Bupati yang pernah memimpin Batanghari pada tahun 1979-1999.¹⁷

Adapun data penulis temukan sumber-sumber dan literatur-literatur yang relevan

¹⁶ Fachruddin Saudagar. 2005. *Sejarah Dalam Ilmu Pengetahuan Sosial (Ips)*. Jambi: FKIP. Hlm.31.

¹⁷ Fachruddin Saudagar. *Ibid*. Hlm. 32.

dengan penelitian yang dilakukan. Sumber-sumber tertulis yang di gunakan oleh peneulis seperti Citra Kota Jambi Dalam Arsip Anri, buku, skripsi, tesis, dan literatur ilmiah lain. Untuk mendapatkan sumber penelitian penulis memanfaatkan beberapa perpustakaan seperti Perpustakaan Universitas Jambi, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya, Perpustakaan Daerah Provinsi Jambi, Perpustakaan Umum Kota jambi, Perpustakaan UIN Sulthan taha Saifudin Jambi, Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Jambi dan yang terahir Perpustakaan FKIP Unja.

2. Kritik Sumber

Kritik sumber adalah menilai sumber-sumber sejarah yang dibutuhkan dalam penulisan sejarah baik kritik eksteren maupun kritik interen¹³. Setelah sumber sejarah dalam berbagai kategorinya itu terkumpul, tahap berikutnya adalah verifikasi atau kritik untuk memperoleh keabsahan sumber. Setelah mengumpulkan sumber, maka tidak secara otomatis sumber-sumber tersebut bisa secara keseluruhan digunakan.

Langkah selanjutnya adalah melakukan kritik terhadap sumber sejarah yang didapatkan. Pada tahapan ini, sumber yang telah di kumpulkan pada kegiatan Heuristik, dilakukan penyaringan atau penyeleksian tentunya dengan mengacu pada prosedur yang ada, yakni sumber yang faktual dan orisinilitasnya terjamin. Dalam sumber mengatakan bahwa verifikasi pada penelitian sejarah identik dengan kritik sumber, yaitu kritik ekstern yang mencari otentisitas atau keotentikan (keaslian sumber) dan kritik intern yang menilai apakah sumber itu memiliki kredibilitas (kebisaan untuk dipercaya) atau tidak. Kritik sumber umumnya dilakukan terhadap sumber-sumber pertama. Kritik ini menyangkut verivikasi sumber yaitu pengujian mengenai kebenaran atau ketepatan (akurasi) dari sumber itu Dalam metode sejarah dikenal dengan cara melakukan kritik eksternal dan kritik internal.

a. Kritik Ekstern

Kritik eksternal yang dimaksud dalam penelitian sejarah adalah cara melakukan verifikasi atau pengujian terhadap aspek-aspek luar dari sumber sejarah. Adapun yang dimaksud dengan kritik eksternal adalah suatu penelitian atas asal-usul dari sumber, suatu pemeriksaan atas catatan atau peninggalan itu sendiri untuk mendapatkan semua informasi yang mungkin, dan untuk mengetahui apakah ada suatu waktu sejak asal mulanya sumber itu telah diubah oleh orang-orang tertentu atau tidak. Dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keabsahan dan otentisitas sumber.

b. Kritik Intern

Sementara itu yang dimaksud dengan kritik internal adalah kritik yang dilakukan dengan memperhatikan dua hal yaitu penilaian intrinsik terhadap sumber-sumber, dan membandingkan kesaksian dari berbagai sumber agar sumber dapat dipercaya (diterima kredibilitasnya). Terkait dengan penelitian ini, maka sumber yang digunakan lebih didominasi oleh sumber lisan. Cara melakukan kritik internal sumber lisan adalah perbandingan melalui wawancara simultan yaitu perbandingan kesaksian sumber lisan dengan mewawancarai banyak sumber yang meliputi pelaku dan penyaksi sejarah. Diperlukan untuk menilai tingkat kelayakan atau kredibilitas sumber. Kredibilitas sumber biasanya mengacu pada kemampuan sumber untuk mengungkapkan kebenaran suatu peristiwa sejarah. Untuk mempertanyakan keotentikan data- data yang terdapat pada sumber berdasarkan ciri-ciri fisik dari suatu sumber ejaan, pola, tulisan bentuk abjad dan tinta yang digunakan.

3. Interpretasi

Tahap selanjutnya adalah interpretasi, yaitu berupa analisis (menguraikan) dan sistesis

(menyatukan) fakta-fakta sejarah. Hal ini dilakukan agar fakta-fakta yang tampaknya terlepas antara satu sama lain bisa menjadi satu hubungan yang saling berkaitan. Dengan demikian interpretasi dapat dikatakan sebagai proses memaknai fakta. Interpretasi itu dapat dilakukan dengan cara memperbandingkan data guna menyikap peristiwa-peristiwa mana yang terjadi dalam waktu yang sama.

4. Historiografi

Fase terakhir dalam penelitian sejarah adalah historiografi. Historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan atau laporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan. Historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan, atau laporan hasil peneliti sejarah yang dilakukan. Penelitian sejarah hendaknya memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penelitian, sejak dari awal (fase perencanaan) sampai dengan penarikan kesimpulan.¹⁸

1.8 Sistematika Penulisan

Hasil penelitian secara ilmiah tentu disajikan dalam bentuk yang sistematis, dalam penyajiannya dilakukan secara kronologi atau berurutan, sebab dengan cara demikian pembaca akan mudah memahami dan mengikuti permasalahan yang dikemukakan oleh penulis. Sistematika penulisannya secara singkat dapat disebutkan sebagai berikut: Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari BAB I, BAB II, BAB III, BAB IV, dan BAB V, yaitu sebagai berikut :

BAB I : **Pendahuluan**, yang berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : **Gambaran Umum Kabupaten Batanghari**. Berisi tentang keadaan wilayah,

¹⁸ Dudung, Abdurahman.(1999).Metodeologi Penelitian Sejarah.Yogyakarta:ArRuzz Media hlm 53

penduduk sosial ekonomi tahun 1979-1999.

BAB III : Tentang Sejarah Muara Bulian, penulis akan melihat perkembangan kota Muara Bulian mulai dari latar belakang historis terbentuknya Muara Bulian, pemindahan Ibukota dari Kenali Asam ke Muara Bulian, sampai terbentuknya dua Kabupaten di Batanghari

BAB IV : Perkembangan Sosial Politik Ekonomi Muara Bulian tahun 1979-1999 yang meliputi aktivitas sosial politik ekonomi di Muara Bulian pra menjadi ibukota dan aktivitas sosial politik ekonomi di Muara Bulian pasca menjadi ibukota

BAB V : Penutup, yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian,